



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Raya Soreang KM. 17 TLP. 5892926 Soreang 40911 Kabupaten Bandung

Soreang, 30 Nopember 2017

Nomor : 938 / 356 /BKD

Sifat :

Lampiran :

Perihal : Laporan Pertanggungjawaban

Hibah Bansos TA 2017

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Perekomendasi Hibah Bansos TA 2017

di

Soreang

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017, bahwa setiap Kabupaten/Kota harus melaporkan capaian keberhasilan pelaksanaan Aksi PPK Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan 2017, yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi dan Bappeda Kab/Kota melalui website untuk setiap triwulan (B03, B06, B09 dan B12).
2. Surat Inspektur Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor 700/152/Inspektorat tanggal 13 September 2017 tentang Laporan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi B09 Tahun 2017.
3. Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 938/588/BKD tanggal 15 September 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Penerima Periode Pencairan Januari s/d September 2017 dan Realisasi Hibah/Bantuan Sosial Triwulan III TA 2017.

Bahwa kami akan segera melakukan rekapitulasi Hibah/Bansos yang telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2017 sekaligus mengentry LPJ dari Penerima Hibah/Bansos yang telah kami terima baik langsung dari penerima Hibah/Bansos maupun dari Perangkat Daerah Perekomendasi untuk diupload pada website.


Sehubungan dengan hal di atas, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah Perekomendasi/Pejabat yang menandatangani NPHD, agar segera meminta laporan pertanggungjawaban kepada seluruh penerima Hibah/Bansos yang telah mencairkan bantuannya pada Tahun Anggaran 2017.
2. Bagi Penerima yang baru mencairkan bantuan hibah/bansos setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, agar diingatkan bahwa laporan pertanggungjawaban harus segera dibuat dan disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Perangkat Daerah Perekomendasi dan tembusannya kepada BKD selaku PPKD c.q UPT Belanja Tidak Langsung paling lambat tanggal 28 Desember 2017.

3. Perangkat Daerah Perekomendasi yang telah menindaklanjuti surat laporan pertanggungjawaban ini kepada penerima Hibah/Bansos agar segera menyampaikan tembusannya kepada BKD selaku PPKD.
4. Perangkat Daerah Perekomendasi/Pejabat yang menandatangani NPHD, agar segera memerintahkan staf untuk melakukan rekonsiliasi realisasi pencairan hibah/bansos dan LPJ yang telah selesai dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku PPKD c.q. UPT BTL BKD dari tanggal 22 Desember sampai dengan 28 Desember 2017.
5. Sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi data realisasi Hibah/Bansos Tahun Anggaran 2017 dan data Laporan Pertanggungjawaban yang telah masuk akan diinformasikan kepada publik melalui website dan sebagai bahan untuk menyusun laporan B12 oleh Inspektorat dan Bappeda Kabupaten Bandung. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu kami ingatkan bahwa data yang sudah di upload pada system pemantauan dan di publikasikan melalui website, tidak dapat diubah/dihapus, untuk itu setiap Perangkat Daerah harus menjamin akurasi data yang akan di publikasikan

Demikian kami sampaikan untuk bahan tindak lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



Dra. Hj. SITI NURAINI ALIMAH, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 195912171986032009

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

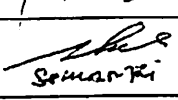


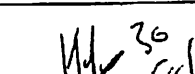
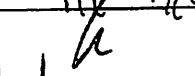

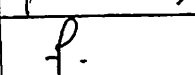

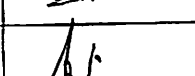
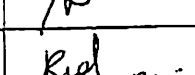
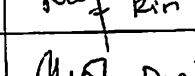
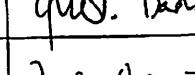
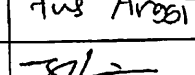
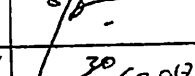
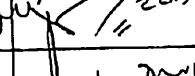
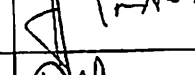
1. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung
4. Inspektur Kabupaten Bandung

Lampiran Surat

Nomor : 938/356/BKD

Tanggal : 30 Nopember 2017

Perihal : Laporan Pertanggungjawaban Hibah Bansos TA 2017

NO	DAFTAR OPD	TANGGAL	TANDA TANGAN TERIMA
1	BUPATI BANDUNG (Sebagai Laporan)		
2	SEKRETARIS DAERAH (sebagai Laporan)		
3	INSPEKTUR	30-11-2017	
4	KEPALA BAPPEDA	30/11/17	
5	KEPALA BAGIAN PROGRAM SETDA	30-11/17	
6	BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BAGKESOS)	30/11/2017	
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN dan PERTANAHAN (DISPERKIMTAN)	30/11/17	
8	DINAS PERINDUSTRIAN (DISPERIN)	30/11/17	
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (Badan KesbangPol)	30/11.2017	
10	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN (DISPAKAN)	30/11-2017	
11	DINAS PERTANIAN (DISTAN)	30/11-2017	
12	DINAS KEPEMUDAAN & OLAHRAGA (DISPORA)	30/11/17	
13	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN (DISPARBUD)	30/11-17	
14	DINAS SOSIAL (DINSOS)	30-11-2017	
15	DINAS TENAGA KERJA (DISNAKER)	30/11/17	
16	DINAS PENDIDIKAN (DISDIK)	30/11/2017	
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK	30/11/17	
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	30/11-17	
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (DPMD)	30/11.2017	